

AS Bakal Izinkan Warga Negara Israel Masuk Tanpa Visa

WASHINGTON (IM) - Pemerintahan Amerika Serikat (AS) bersiap menerima Israel sebagai klub eksklusif. AS akan mulai mengizinkan warga negara Israel melakukan perjalanan tanpa visa. Para pejabat AS mengatakan, pengumuman masuknya Israel ke dalam Program Bebas Visa direncanakan akan dilakukan pada akhir pekan ini. Keputusan ini ditetapkan tepat sebelum akhir tahun anggaran federal pada Sabtu (30/9). Tanggal tersebut merupakan batas waktu penerimaan Israel tanpa harus memenuhi syarat ulang untuk memenuhi syarat pada tahun depan.

Departemen Keamanan Dalam Negeri mengelola program tersebut saat ini hanya mengizinkan warga negara dari 40 negara Eropa dan Asia untuk melakukan perjalanan ke AS selama tiga bulan tanpa visa. Namun daftar ini akan berubah usai Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Alejandro Mayorkas membuat pengumuman tersebut pada Kamis (28/9).

Menurut lima pejabat yang mengetahui masalah tersebut dan berbicara dengan syarat anonim karena keputusan tersebut belum diumumkan secara publik, Mayorkas menerima rekomendasi dari Menteri Luar Negeri Antony Blinken agar Israel diterima.

Rekomendasi Blinken diperkirakan akan disampaikan selambat-lambatnya pada Selasa (26/9). Sedangkan pengumuman akhir akan dilakukan hanya delapan hari setelah Presiden AS Joe Biden bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York di sela-sela Majelis Umum PBB.

Para pemimpin tidak mengangkat masalah ini dalam pernyataan singkat pada pertemuan itu. Namun masalah ini telah menjadi subyek negosiasi dan perdebatan yang intens selama berbulan-bulan, seiring dengan upaya pemerintahan Biden untuk mencapai kesepakatan guna menormalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi.

Baik Departemen Luar Negeri maupun Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan, tidak memiliki informasi untuk diumumkan secara publik saat ini. Kedua lembaga tersebut pun akan membuat keputusan akhir dalam beberapa hari mendatang. Menurut Departemen Luar Negeri, AS bekerja sama dengan Israel untuk memenuhi seluruh persyaratan penegakan hukum, keamanan nasional, dan imigrasi dari program tersebut.

Pengakuan Israel telah menjadi prioritas bagi para pemimpin negara itu berturut-turut dan

akan menjadi pencapaian besar bagi Benjamin Netanyahu. Terlebih lagi, pemerintah Israel kini sering berselisih dengan AS mengenai Iran, konflik Palestina, dan yang terbaru usulan perubahan sistem peradilan Israel.

Pemerintahan sayap kanan Netanyahu telah berulang kali menaiki kecemasan AS atas perlakuannya terhadap warga Palestina. Masalah-masalah yang disoroti seperti pembangunan permukiman di Tepi Barat yang agresif, penolakannya terhadap negara Palestina, dan komentar anti-Palestina yang menghasut dari para menteri senior Kabinet.

Tapi langkah AS dalam pembebasan visi akan memberikan dorongan positif bagi Netanyahu. Dia telah menghadapi protes massal selama berbulan-bulan terhadap rencana peradilanannya dan kemungkinan besar akan mendapat kecemasan dari Palestina. Palestina menilai, AS tidak seharusnya memberikan penghargaan kepada pemerintah Israel pada saat upaya perdamaian terhenti.

Israel memenuhi dua dari tiga kriteria paling penting selama dua tahun terakhir untuk bergabung dengan program AS. Persentase penolakan permohonan visa yang rendah dan tingkat masa tinggal visa yang rendah. Negara ini telah berujung untuk memenuhi persyaratan ketiga, yang merupakan persyaratan timbal balik. Semua warga negara AS, termasuk warga Amerika keturunan Palestina, harus diperlakukan sama ketika bepergian ke atau melalui Israel.

Dengan alasan keamanan nasional, Israel telah lama menerapkan persyaratan masuk dan proses penyangkutan yang terpisah bagi warga Amerika keturunan Palestina. Banyak yang mengeluh bahwa prosedurnya membebankan dan diskriminatif. Warga Amerika yang memiliki dokumen kewarganegaraan Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagian besar dilarang menggunakan bandara internasional Israel. Sebaliknya, seperti warga Palestina lainnya, mereka terpaksa melakukan perjalanan melalui Yordania atau Mesir untuk mencapai tujuan.

Dalam beberapa bulan terakhir, Israel telah melakukan penyesuaian persyaratan masuk bagi warga Amerika keturunan Palestina. Israel telah mengizinkan mereka travel masuk dan keluar dari Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv dan langsung menuju Tepi Barat dan wilayah Israel. Israel juga telah berjanji untuk memudahkan pergerakan warga Amerika Palestina yang masuk dan keluar dari Jalur Gaza yang dikuasai Hamas. ● **gul**

Negara Afrika Ramai-ramai Protes di Sidang PBB

ABUJA (IM) - Para pemimpin Afrika menyampaikan pesan yang jelas saat berpidato di Sidang Majelis Umum PBB (UNGA) ke-78. Mereka sepakat negara-negara yang berada di Afrika sudah menjadi korban tatanan pasca-Perang Dunia II. Mereka mendesak agar negara-negara lain bermitra, bukan malah dikesampingkan.

Sebagian besar negara Afrika telah mencapai kemerdekaan cukup lama dan benua berpenduduk lebih dari 1,3 miliar orang ini lebih sadar akan tantangan yang menghambat pembangunannya. Ada juga keberanian baru yang muncul dari kursi G20 di Uni Afrika.

"Kami sebagai Afrika datang ke dunia ini, bukan untuk meminta sedekah, amal atau bantuan, tetapi untuk bekerja sama dengan komunitas global dan memberikan setiap umat manusia di dunia ini kesempatan yang layak untuk mendapatkan keamanan dan kesejahteraan," Presiden Kenya William kata Ruto.

Dalam beberapa tahun terakhir, Afrika sudah jelas mengenai kapasitasnya untuk menjadi kekuatan global. Benua ini memulai upaya untuk mengatasi perubahan iklim di negaranya sendiri meskipun Afrika berkontribusi paling kecil terhadap perubahan iklim. Wilayah ini juga membantu memupuk perdamaian di tempat lain, seperti di Rusia dan Ukraina.

Dalam pidato di UNGA, Presiden Ghana Nana Akufo-Addo menyalahkan tantangan yang dihadapi Afrika saat ini akibat ketidakadilan historis. Dia menyerukan reparasi atas perdagangan budak. Bagi Akufo-Addo, memperbaiki tatanan dunia yang tidak adil harus dimulai dengan pembayaran reparasi dari era ketika sekitar 12,5 juta orang diperbudak. Dia merujuk pada Database Perdagangan Budak Trans-Atlantik.

"Inilah saatnya untuk mengakui secara terbuka bahwa sebagian besar Eropa dan Amerika Serikat dibangun dari kekayaan besar yang diperoleh dari keringat, air mata, darah, dan keringan perdagangan budak trans-Atlantik serta eksploitasi kolonial selama berabad-abad," kata Akufo-Addo.

Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengatakan, benua itu siap untuk mendapatkan kembali posisinya sebagai tempat kemajuan umat manusia. Mereka mampu meskipun menghadapi warisan eksploitasi dan penaklukan.

Pemimpin Nigeria Bola Tinubu mendesak rekan-rekannya untuk melihat wilayah tersebut bukan sebagai masalah yang harus dihindari tetapi sebagai teman dan mitra seati. "Afrika adalah kunci masa depan dunia," kata pemimpin negara yang diperkirakan menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia pada 2050.

Direktur program Afrika di Crisis Group Murihti Mutiga melihat, sebagai blok negara terbesar di PBB, dapat dimengerti bahwa para pemimpin Afrika semakin menuntut suara yang lebih besar di lembaga-lembaga multilateral. "Seruan tersebut akan semakin meningkat terutama pada saat benua ini sedang dirayu oleh negara-negara besar di tengah meningkatnya persaingan geopolitik," ujarnya.

Selain melalui pidato di UNGA, di sela-sela pertemuan PBB, Bank Pembangunan Afrika memobilisasi beberapa pemimpin politik dan bisnis di sebuah acara bertajuk "Afrika yang Tak Dapat Dihentikan". Kegiatan itu dianggap mencerminkan aspirasi benua tersebut hanya beberapa hari setelah KTT Iklim Afrika yang pertama kali. Tapi dengan populasi kaum muda yang diperkirakan akan meningkat dua kali lipat pada 2050, Afrika adalah satu-satunya wilayah yang berkembang pesat.

Hanya saja, wilayah ini masih menghadapi kondisi penduduk yang semakin miskin dan sebagian orang merayakan pengambilalihan pemerintahan yang dipilih secara demokratis oleh militer. "Afrika adalah sebuah paradoks," kata kepala analisis Tanduk Afrika/Teluk di lembaga think-tank Sahana Research yang berbasis di Nairobi Rashid Abdi.

"Ini bukan hanya benua yang harapannya semakin berkurang, ada beberapa wilayah di Afrika di mana kita melihat inovasi, pemikiran progresif, dan solusi yang sangat cerdas," ujarnya. ● **gul**



NYIMAS GAGAL RAIH MEDALI SKATEBOARD

Altlet skateboard Indonesia Nyimas Bunga Cinta melakukan trik pada final putri Asian Games 2022 di Qiantang Roller Sports Centre, Hangzhou, Tiongkok, Senin (25/9). Nyimas gagal raih medali usai hanya mencatatkan skor terbaik di 60,41.

Takut Pembersihan Etnis, 120 Ribu Warga Armenia Tinggalkan Nagorno-Karabakh

Nagorno-Karabakh adalah wilayah yang diperebutkan oleh Azerbaijan dan Armenia.

KARABAKH (IM) - Sebanyak 120 ribu warga etnis Armenia di Nagorno-Karabakh akan meninggalkan wilayah tersebut dan pergi ke Armenia. Mereka tak ingin hidup sebagai bagian dari Azerbaijan dan takut akan pembersihan etnis.

Hal itu diungkap pejabat tinggi Republik Artsakh, yakni sebuah pemerintahan yang memisahkan diri dari Azerbaijan dan mengontrol wilayah Nagorno-Karabakh. "Rakyat kami tidak ingin hidup sebagai bagian dari Azerbaijan. (Sebanyak) 99,9 persen memilih meninggalkan tanah bersejarah kami," ungkap David Babayan, yakni penasihat Samvel Shahramanyan yang menjabat sebagai presiden Republik Artsakh, Senin (25/9).

"Nasib masyarakat miskin kami akan tercatat dalam sejarah sebagai aib dan hal memalukan bagi rakyat Armenia serta seluruh peradaban dunia. Mereka yang bertanggung jawab atas nasib kami suatu hari nanti harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan," tambah Babayan.

Para pemimpin etnis Armenia di Karabakh mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa semua orang yang kehilangan tempat tinggal

akibat operasi militer Azerbaijan di Nagorno-Karabakh dan ingin pergi akan diantar ke Armenia oleh pasukan penjaga perdamaian Rusia.

Babayan mengatakan belum jelas kapan penduduk akan pindah ke koridor Lachin yang menghubungkan wilayah tersebut dengan Armenia.

Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan sempat menyampaikan bahwa warga etnis Armenia di Nagorno-Karabakh kemungkinan besar akan meninggalkan wilayah tersebut.

Dia mengatakan sejumlah bantuan kemanusiaan telah tiba di Nagorno-Karabakh. Namun warga etnis Armenia di sana masih menghadapi bahaya pembersihan etnis.

"Jika kondisi kehidupan yang nyata tidak tercipta bagi warga Armenia di Nagorno-Karabakh, di rumah mereka, dan tidak ada mekanisme perlindungan yang efektif terhadap pembersihan etnis, maka kemungkinan besar warga Armenia di Nagorno-Karabakh akan melihat pengungsiran dari tanah air mereka sebagai satu-satunya jalan keluar," ucap Pashinyan.

Dia menegaskan, Armenia akan membuka pintu dan siap menerima kedatangan mereka. "(Armenia) dengan penuh kasih akan menyam-

but saudara-saudari kami dari Nagorno-Karabakh," ujarnya.

Pashinyan telah menghadapi gelombang protes dari warganya. Dia dianggap gagal mempertahankan wilayah Nagorno-Karabakh.

Nikol Pashinyan akan bertemu Ilham Aliyev

Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev diagendakan mengadakan pertemuan di Spanyol bulan depan. Mereka bakal membahas tentang eskalasi terbaru di wilayah Nagorno-Karabakh yang dipersengketakan kedua negara. Dilaporkan laman Euronews, Dewan Keamanan Armenia, pada Senin (25/9) mengungkapkan, pertemuan antara Pashinyan dan Aliyev akan digelar di kota Granada, 5 Oktober 2023 mendatang. Pertemuan mereka bakal turut dihadiri Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, dan Ketua Dewan Eropa Charles Michel.

Prancis, Jerman, dan Uni Eropa telah menjadi pemain kunci dalam upaya penyelesaian konflik di Nagorno-Karabakh yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Secara internasional, wilayah tersebut diakui sebagai bagian dari Azerbaijan. Namun selama tiga dekade terakhir, pemerintahan di Nagorno-Karabakh dijalankan oleh kelompok separatist Armenia.

Pada 19 September 2023 lalu, Azerbaijan melancarkan operasi militer terbaru ke wilayah Nagorno-Karabakh. Mereka menyebut operasi itu sebagai operasi "anti-teroris".

Tujuan operasi adalah memukul pasukan etnis Armenia yang mengontrol wilayah tersebut. Menurut Armenia, lebih dari 200 orang tewas dan 400 lainnya mengalami luka-luka dalam operasi militer Azerbaijan.

Pemerintah Azerbaijan mengatakan bersedia melakukan pertemuan dengan pasukan etnis Armenia yang mengontrol wilayah yang sengketa Nagorno-Karabakh. Namun Azerbaijan meminta mereka terlebih dulu meletakkan senjata dan menyerah. "Untuk menghentikan tindakan anti-teroris, angkatan bersenjata ilegal Armenia harus mengibarkan bendera putih, menyerahkan semua senjata, dan rezim ilegal harus membubarkan diri," kata Kantor Kepresidenan Azerbaijan dalam sebuah pernyataan, 19 September 2023 lalu.

Pasukan etnis Armenia setuju untuk melucuti senjata mereka berdasarkan ketentuan gencatan senjata yang dicapai pada Rabu (20/9) pekan lalu. Rusia, yang memiliki 2.000 pasukan penjaga perdamaian di Nagorno-Karabakh mengatakan, berdasarkan ketentuan gencatan senjata, enam kendaraan lapis baja, lebih dari 800 senjata ringan, senjata anti-tank dan sistem pertahanan udara portabel, serta 22 ribu butir amunisi telah diserahkan pada Sabtu (23/9).

Sekilas tentang konflik Nagorno-Karabakh

Nagorno-Karabakh, yang dikenal sebagai Artsakh oleh orang Armenia, terletak di wilayah yang selama berabad-abad berada di bawah kekuasaan

Ribuan Pengunjung Rasa Minta Inggris Gabung Kembali ke Uni Eropa

LONDON (IM) - Ribuan pengunjung rasa anti-Brexit berkumpul di ibu kota Inggris, London, untuk menyerukan bergabung kembali dengan Uni Eropa (UE) pada akhir pekan. Kegiatan itu diselenggarakan oleh National Rejoin March.

Mereka yang mendukung agenda pengembalian kembali ini berbaris menuju Lapangan Parlemen. Para demonstran menuntut agar negara itu kembali dengan aliansi negara-negara Eropa.

Para pengunjung rasa membawa bendera UE dan mengenakan topi serta kaos yang

juga menampilkan bendera UE. Mereka juga membawa spanduk yang meminta pemerintah yang memimpin sekarang untuk mundur.

Ketua Gerakan Eropa Inggris yang juga mengahdiri pawai tersebut Mike Galsworthy dikutip dari Anadolu Agency.

Dalam referendum yang diadakan di Inggris pada 2016, mayoritas warga Inggris memilih mengeluarkan negara tersebut dari UE. Setelah perjanjian penarikan Brexit yang ditandatangani oleh perwakilan Inggris dan UE pada 24 Januari 2020, Inggris secara resmi menarik diri dari UE pada 31 Januari 2020. ● **ans**

Brexit dan memastikan bahwa kita bergabung kembali dengan Uni Eropa dan kembali mendapatkan kursi di meja perundingan," ujar Galsworthy dikutip dari Anadolu Agency.

Dalam referendum yang diadakan di Inggris pada 2016, mayoritas warga Inggris memilih mengeluarkan negara tersebut dari UE. Setelah perjanjian penarikan Brexit yang ditandatangani oleh perwakilan Inggris dan UE pada 24 Januari 2020, Inggris secara resmi menarik diri dari UE pada 31 Januari 2020. ● **ans**



FESTIVAL PERTENGAHAN MUSIM GUGUR DI MALAYSIA

Anak-anak mengenakan Hanfu (pakaian kuno yang secara tradisional digunakan oleh etnis mayoritas Tionghoa Han) dalam perayaan Festival Pertengahan Musim Gugur mendatang di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (24/9).

Prancis Tarik Dubes dan Pasukan Militer dari Niger

PARIS (IM) - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan, Prancis akan menarik duta besarnya dan mengakhiri semua kerja sama militer dengan Niger setelah kudeta. Dia menegaskan, pasukan Prancis akan berangkat dari Niger dalam beberapa bulan mendatang.

"Prancis telah memutuskan untuk menarik duta besarnya. Dalam beberapa jam ke depan duta besar kami dan beberapa diplomat akan kembali ke Prancis," kata Macron dikutip dari BBC.

Macron menegaskan, Prancis tidak akan disandera oleh para pelaku kudeta, ketika berbicara kepada stasiun televisi Prancis TF1 dan France 2. Dia masih menganggap Presiden Niger yang digulingkan Mohamed Bazoum yang saat ini ditahan oleh para pemimpin kudeta sebagai satu-satunya otoritas yang sah di Niger.

Presiden Prancis pun mengaku telah memberitahukan keputusannya kepada Bazoum. Dia menggambarkan presiden yang digulingkan itu sebagai sandera.

"Dia menjadi sasaran kudeta ini karena dia melakukan reformasi yang berani dan karena sebagian besar terjadi perselisihan antar etnis dan banyak kepegecutan politik," kata Macron.

Junta militer yang merebut kekuasaan di Niger menyambut baik langkah penarikan Prancis. "Pekan ini kami merayakan langkah

baru menuju kedaulatan Niger," kata junta yang merebut pemerintah pada Juli 2023.

Ada sekitar 1.500 tentara Prancis di negara Afrika Barat yang terkurung daratan itu. Keputusan Paris ini diambil setelah berbulan-bulan terjadi permusuhan dan protes terhadap kehadirannya di negara tersebut, dengan demonstrasi rutin di ibu kota Niamey.

Langkah ini memberikan pukulan telak terhadap operasi Perancis melawan ekstremis di wilayah Sahel dan memudarnya pengaruh negara Eropa itu di wilayah itu. Niger adalah salah satu dari beberapa bekas jajahan Prancis di Afrika Barat yang baru-baru ini diambil alih oleh militer, setelah Burkina Faso, Guinea, Mali dan Chad. Kudeta terakhir terjadi di Gabon pada Agustus.

Kecaman anti-Prancis telah berkembang di kawasan ini dalam beberapa tahun terakhir. Banyak politisi lokal yang menuduh Paris menerapkan kebijakan neokolonialis dan tuduhan itu telah dibantah.

Komunitas Ekonomi regional Negara-negara Afrika Barat (Ecowas) yang didukung oleh Perancis telah mengancam akan melakukan intervensi militer di Niger untuk mengembalikan jabatan Bazoum. Namun sejauh ini pihaknya belum bertindak. ● **gul**